

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021 -2026

1. NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BARAT

1.1. TUGAS : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Base line	Formula Penghitungan	Keterangan (Penanggungjawab)
(1)	(2)		(8)	
Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015		$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang}}{\text{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Bidang PemNag
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan yang aktif : - Posyandu Mandiri		Jumlah posyandu mandiri	Bidang KMA
	- LPM		$\frac{\text{Jumlah LPM yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh LPM}} \times 100\%$	Bidang KMA
	- KAN		$\frac{\text{Jumlah KAN yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh KAN}} \times 100\%$	Bidang KMA
Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan	- Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Perdesaan yang aktif		$\frac{\text{Jumlah BUMNag yang aktif}}{\text{Jumlah BUMNag yang harus dibentuk}} \times 100\%$	Bidang UEM, SDA dan TTG
	- Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk		Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	Bidang KPKP

1.2. FUNGSI :

- a. perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa/Nagari, Kelembagaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Base line	Formula Penghitungan	Keterangan (Penanggungjawab)
(1)	(2)		(8)	
Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015		$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang}}{\text{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Bidang PemNag
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan yang aktif : - Posyandu Mandiri		Jumlah posyandu mandiri	Bidang KMA
	- LPM		$\frac{\text{Jumlah LPM yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh LPM}} \times 100\%$	Bidang KMA
	- KAN		$\frac{\text{Jumlah KAN yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh KAN}} \times 100\%$	Bidang KMA
Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan	- Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Perdesaan yang aktif		$\frac{\text{Jumlah BUMNag yang aktif}}{\text{Jumlah BUMNag yang harus dibentuk}} \times 100\%$	Bidang UEM, SDA dan TTG
	- Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk		Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	Bidang KPKP